



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BUKU ALOKASI DAN RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

2025

Provinsi Jawa Timur

BUKU ALOKASI DAN RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 PROVINSI JAWA TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2025. APBN TA 2025 disusun dengan mempertimbangkan faktor perekonomian global dan dilandaskan pada bauran kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mendorong pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, serta memberikan ruang untuk pelaksanaan program pemerintahan selanjutnya. Hal tersebut diperlukan agar peralihan pemerintahan dapat dilakukan secara lancar pada masa transisi. Kebijakan fiskal yang disusun diharapkan dapat menjawab tantangan, baik struktural maupun siklikal, yang berasal dari global dan domestik.

Pada tahun 2025, dunia diproyeksikan masih akan dihadapkan dengan berlanjutnya ketegangan geopolitik antarnegara yang menimbulkan perang, fragmentasi, proteksionisme, dan disrupsi rantai pasok sehingga menyebabkan harga-harga komoditas pangan, energi, dan pupuk melambung tinggi. Selain itu, suku bunga global yang bertahan tinggi, lemahnya pertumbuhan ekonomi dunia, dan gejolak pasar keuangan turut mempengaruhi risiko global. Indonesia mampu menjaga resiliensi perekonomian, investasi, dan ekspor, lebih baik dibandingkan global. Kita patut bersyukur dan bangga bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih tumbuh sebesar 5,1% di Triwulan ke-3 2024 (y-on-y).

Sebagai tahun pertama pemerintahan baru, tahun 2025 akan menjadi pilar penting untuk menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sebelumnya. Belanja APBN menjadi instrumen untuk merespon tantangan struktural dan mengamankan dari berbagai guncangan (*shock absorber*), dirancang fleksibel dengan menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian, serta mendukung keberlanjutan pembangunan. Akselerasi transformasi ekonomi terus ditingkatkan melalui revitalisasi industri termasuk hilirisasi dan ekosistem *electric vehicles (EV) industry*, penguatan sektor jasa termasuk ekonomi kreatif dan digitalisasi, serta penguatan reformasi struktural untuk meningkatkan *ease of doing business*, dan memperkuat daya saing produk ekspor dan investasi.

Selanjutnya, guna mencapai Visi Indonesia Emas 2045, yaitu menjadi negara maju dan keluar dari jebakan *middle income trap* diperlukan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, APBN harus didorong untuk semakin sehat agar dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan makro fiskal tahun 2025 diarahkan untuk menjaga keberlanjutan sekaligus penguatan program prioritas dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, APBN TA 2025 disusun sebagai jangkar untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan kebijakan *countercyclical* yang terukur dan terkendali. Indonesia perlu mengakselerasi

pertumbuhan ekonomi hingga 6 bahkan 8% agar mampu keluar dari *middle income trap* dengan cara menciptakan produktivitas untuk meningkatkan kemakmuran. Indonesia harus bisa membangun daya saing dan produktivitas di pasar dunia, serta menekan korupsi.

Pengelolaan fiskal daerah berpedoman pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) beserta peraturan pelaksanaan turunannya. Sesuai tujuan pembentukannya, UU HKPD diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, mendukung sektor-sektor prioritas yang akan dilaksanakan oleh daerah, serta meningkatkan sinergi kebijakan fiskal serta harmonisasi belanja pusat dan daerah dalam rangka mendukung kinerja daerah, mengentaskan kemiskinan, dan memajukan perekonomian daerah. Adapun pokok arah kebijakan fiskal daerah adalah sebagai berikut:

1. Mendorong sinergi dan harmonisasi fiskal pusat dan daerah untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
2. Memperkuat kemampuan keuangan daerah guna mendorong peningkatan belanja produktif;
3. Menciptakan kegiatan ekonomi baru (*growth, wellbeing*, dan konvergensi);
4. Perbaikan kualitas belanja APBD;
5. Penguatan *local taxing power*;
6. Pengembangan pembiayaan inovatif; dan
7. Memperbaiki mekanisme penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) guna menjaga kondisi fiskal pemerintah daerah.

Sejalan dengan pokok arah kebijakan fiskal dan dalam rangka menghadapi tantangan strategis di atas, maka kebijakan TKD TA 2025 diarahkan untuk:

1. Meningkatkan kualitas desentralisasi fiskal dengan memperkuat penggunaan *earmarking* Dana Alokasi Umum (DAU), meningkatkan efektivitas Dana Alokasi Khusus (DAK), dan mengoptimalkan Dana Desa, diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.
2. Mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dimana TKD difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, seperti infrastruktur, sumber daya manusia, dan pariwisata.
3. Menguatkan sinergi kebijakan fiskal dimana kebijakan TKD disinergikan dengan kebijakan fiskal pusat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang lebih luas, seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Memperluas cakupan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga diharapkan kebijakan TKD dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, alokasi TKD mengalami kenaikan dari

tahun ke tahun dan telah mencapai 25,8% dari total APBN TA 2025. Pada TA ditetapkan sebesar Rp919,9 triliun, termasuk di dalamnya Dana Desa sebesar Rp71,0 triliun. Rincian alokasi masing-masing jenis Transfer ke Daerah ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025.

Buku ini diterbitkan dalam rangka memberikan informasi kepada pemerintah daerah mengenai alokasi masing-masing jenis dana TKD tersebut. Saya berharap, buku ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan APBD TA 2025. Mengingat pentingnya APBN TA 2025 sebagai pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sekarang ke pemerintah yang akan datang, maka saya berharap kepada segenap pemerintah daerah untuk segera memanfaatkan dana TKD tersebut sesuai dengan arah kebijakan memperkuat sinergi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah lainnya untuk menjaga "Stabilitas, Inklusivitas, dan Keberlanjutan". Akhir kata, saya mengajak seluruh pihak terkait untuk bekerja sama dalam menyukseskan pelaksanaan kebijakan TKD TA 2025. Mari kita bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik.

Jakarta, 24 Oktober 2024

MENTERI KEUANGAN,



 SRI MULYANI INDRAWATI 

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TAHUN 2025	1
REKAPITULASI ALOKASI SE-PROVINSI JAWA TIMUR	12
1. PROVINSI JAWA TIMUR	14
2. KAB. BANGKALAN	15
3. KAB. BANYUWANGI	16
4. KAB. BLITAR.....	17
5. KAB. BOJONEGORO.....	18
6. KAB. BONDOWOSO.....	19
7. KAB. GRESIK	20
8. KAB. JEMBER	21
9. KAB. JOMBANG	22
10. KAB. KEDIRI	23
11. KAB. LAMONGAN	24
12. KAB. LUMAJANG	25
13. KAB. MADIUN.....	26
14. KAB. MAGETAN	27
15. KAB. MALANG	28
16. KAB. MOJOKERTO	29
17. KAB. NGANJUK	30
18. KAB. NGAWI	31
19. KAB. PACITAN.....	32
20. KAB. PAMEKASAN	33
21. KAB. PASURUAN.....	34
22. KAB. PONOROGO	35
23. KAB. PROBOLINGGO	36
24. KAB. SAMPANG	37
25. KAB. SIDOARJO.....	38
26. KAB. SITUBONDO	39
27. KAB. SUMENEP.....	40
28. KAB. TRENGGALEK	41
29. KAB. TUBAN	42
30. KAB. TULUNGAGUNG.....	43
31. KOTA BLITAR	44
32. KOTA KEDIRI	45

33. KOTA MADIUN	46
34. KOTA MALANG	47
35. KOTA MOJOKERTO	48
36. KOTA PASURUAN	49
37. KOTA PROBOLINGGO	50
38. KOTA SURABAYA	51
39. KOTA BATU	52
TIM PENYUSUN BUKU	53

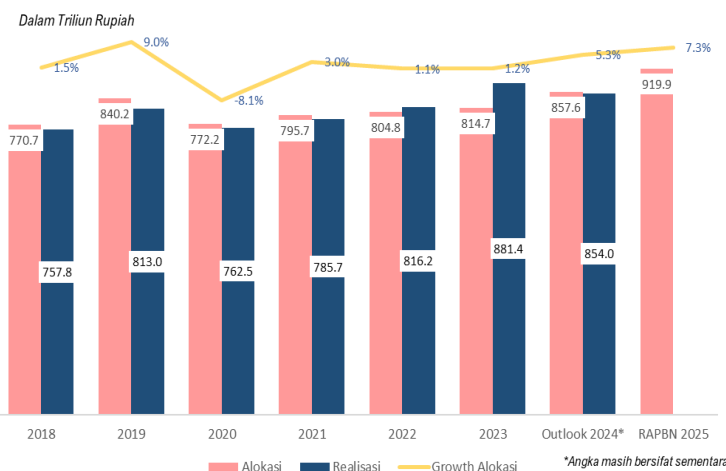


RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TA 2025



TRANSFER KE DAERAH (TKD) TA 2025

Diarahkan untuk Mendorong Belanja Daerah yang Efektif dan Efisien untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di daerah



KEBIJAKAN UMUM TKD 2025

- 1 Sinergi dan harmonisasi fiskal pusat dan daerah.
- 2 Menciptakan kegiatan ekonomi baru (*growth, wellbeing*, dan konvergensi).
- 3 Perbaikan kualitas belanja APBD.
- 4 Penguatan *local taxing power*.
- 5 Pengembangan pembiayaan inovatif.

Peningkatan alokasi TKD antara lain dipengaruhi oleh:

- peningkatan penerimaan negara yang dibagihasilkan melalui DBH,
- dukungan pendanaan untuk PPPK,
- penambahan target sasaran guru penerima dana TPG yang telah bersertifikasi, dan
- dukungan penganggaran untuk prioritas nasional

POSTUR TRANSFER KE DAERAH TA 2025

URAIAN	2023	2024	2024	2025
	Realisasi (Audited)	Perpres 76/2023	Outlook	RUU APBN 2025
1. Dana Bagi Hasil	205,7	143,1	143,1	192,3
2. Dana Alokasi Umum	398,0	427,7	427,7	446,6
- DAU tidak ditentukan penggunaannya	288,9	343,5	343,5	358,6
- DAU ditentukan penggunaannya :	109,1	84,2	84,2	88,0
▪ Penggajian Formasi PPPK	25,7	15,7	15,7	17,3
▪ Pendanaan Kelurahan	1,6	1,7	1,7	1,7
▪ Pendanaan Layanan Publik	81,7	66,8	66,8	69,0
3. Dana Alokasi Khusus	181,4	188,1	184,9	185,2
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	50,3	53,8	51,1	36,9
b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	128,1	133,8	132,7	146,7
c. Hibah ke Daerah	2,9	1,2	1,1	1,6
4. Dana Otonomi Khusus	17,2	18,3	18,3	17,5
5. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	1,4	1,4	1,4	1,2
6. Dana Desa	69,9	71,0	70,9	71
7. Insentif Fiskal	7,9	8,0	7,8	6,0
TOTAL TKD	881,5	857,6	854,0	919,9

Penjelasan Pagu Anggaran TKD TA 2025:

DBH naik sebesar Rp 49,2 T karena:

- ✓ Peningkatan proyeksi penerimaan negara
- ✓ Alokasi Kurang Bayar DBH Rp27,8 T.

DAU naik sebesar Rp 18,9 T karena:

- ✓ Dukungan penggajian formasi ASND 2025 dan dukungan penggajian PPPK yang telah diangkat.
- ✓ Diusulkan untuk pergeseran DAU Penggajian PPPK ke DAU Yang tidak ditentukan Penggunaannya

DAK Nonfisik naik sebesar Rp 13,9 T karena:

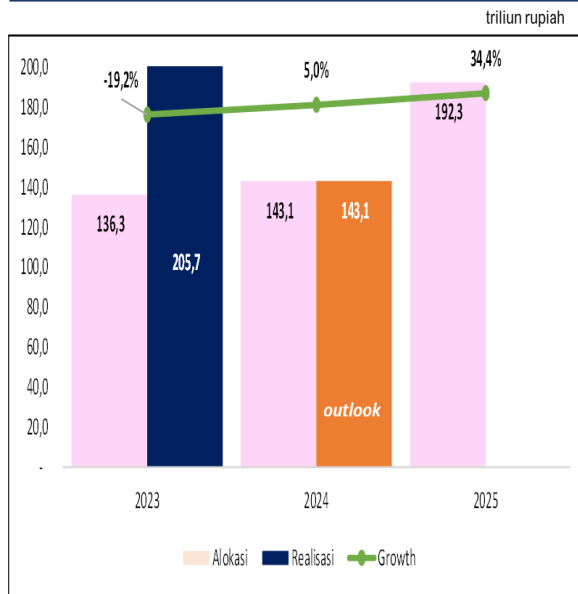
- ✓ Terutama adanya kenaikan sasaran guru bersertifikasi dan perluasan sasaran beberapa jenis DAK Nonfisik.

Beberapa jenis TKD mengalami penurunan karena:

- ✓ Untuk memberi ruang fiskal yang memadai sesuai strategi pelaksanaan prioritas nasional di daerah.

PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DANA BAGI HASIL TA 2025

PERKEMBANGAN DBH TA 2023-2025



□ Pada tahun 2023, dilakukan penyelesaian KB DBH s.d. TA 2022 dan penambahan alokasi DBH reguler, sehingga total realisasi DBH menjadi Rp205,7 Triliun.

KEBIJAKAN DBH TA 2025

1. Alokasi DBH yang berkeadilan dan mendorong pelestarian lingkungan serta perubahan iklim.
2. Penyaluran DBH berdasarkan kinerja.
3. Penggunaan DBH *earmarked* untuk sektor prioritas dan penguatan sinergi dengan memanfaatkan teknologi informasi.
4. Transparansi dan akuntabilitas DBH.

POSTUR DANA BAGI HASIL TA 2025

(miliar rupiah)

Jenis DBH	2024 APBN	2025 RAPBN	Selisih	
			Rp	%
Pajak	55.773,9	77.302,8	21.528,9	38,6%
PPh	31.626,6	44.933,1	13.306,5	42,1%
PBB	19.166,6	25.970,8	6.804,2	35,5%
CHT	4.980,8	6.399,0	1.418,2	28,5%
SDA	84.326,0	85.921,0	1.595,0	1,9%
Migas	15.316,0	16.250,9	934,8	6,1%
Minerba	65.079,7	66.402,1	1.322,3	2,0%
Kehutanan	1.464,3	1.104,6	-359,6	-24,6%
Panas Bumi	1.475,8	1.426,6	-49,2	-3,3%
Perikanan	990,2	736,8	-253,3	-25,6%
Lainnya	3.000,0	1.249,9	-1.750,1	-58,3%
Perkebunan Sawit	3.000,0	1.249,9	-1.750,1	-58,3%
Kurang Bayar	0,0	27.808,0	27.808,0	
Total	143.099,9	192.281,7	49.181,8	34,4%

Alokasi DBH dalam RAPBN 2025 sebesar Rp192,3 triliun.

- Alokasi DBH Pajak sebesar Rp77,3 triliun, dengan **alokasi terbesar pada DBH PPh** sebesar Rp44,9 triliun.
- Alokasi DBH SDA sebesar Rp85,9 triliun, dengan **alokasi terbesar pada DBH Mineral dan Batubara** sebesar Rp66,4 triliun.
- Alokasi DBH Perkebunan Sawit sebesar Rp1,3 triliun (4% dari perkiraan realisasi penerimaan Pungutan Ekspor dan Bea Keluar tahun 2024).
- Alokasi minimum DBH Perkebunan Sawit per daerah sebesar Rp500 juta.
- Kurang Bayar DBH dialokasikan sebesar Rp27,8 triliun.

KEBIJAKAN PENGGUNAAN DBH EARMARKED TA 2025

DBH DR

- Optimalisasi penggunaan Sisa DBH DR Kab/Kota sesuai ketentuan perundangan
- Perluasan penggunaan kegiatan strategis lainnya antara lain :
 - ✓ Penguatan Integrated Area Development (IAD)
 - ✓ Pengelolaan kebersihan untuk pelestarian hutan
 - ✓ Pengelolaan jalan sekitar Kawasan
 - ✓ Dukungan pencapaian FOLU Net Sink 2030,
 - ✓ Bantuan jaminan sosial bagi pekerja sektor kehutanan kategori rentan,
 - ✓ Pengelolaan daerah aliran sungai.



DBH CHT

- Digunakan untuk bidang kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum.
- Penerima manfaat termasuk:
 - petani tembakau dan buruh tani tembakau.
 - petani cengkeh dan buruh tani cengkeh.
- Fleksibilitas penggunaan
 - Opsi pengalihan anggaran.
 - Penambahan menu kegiatan.

DBH Sawit

- Fokus pada infrastruktur jalan (minimal 80% dari alokasi).
- Mendorong pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan:
 - Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan.
 - Sertifikasi ISPO pekebun.
 - Rehab hutan dan lahan.
- Terdapat nilai alokasi minimum per daerah.

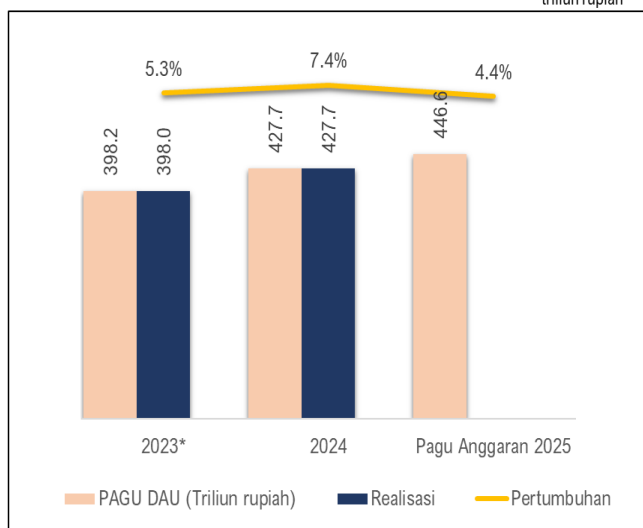


PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DAU TA 2025

Pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi dan ekualisasi kualitas layanan dasar daerah

PERKEMBANGAN DAU TA 2023-2025

triliun rupiah



*TA. 2023 termasuk Tambahan DAU untuk THR/G13 Guru ASND sebesar Rp2.2 T
 **(Realisasi 2024 = Outlook 2024)

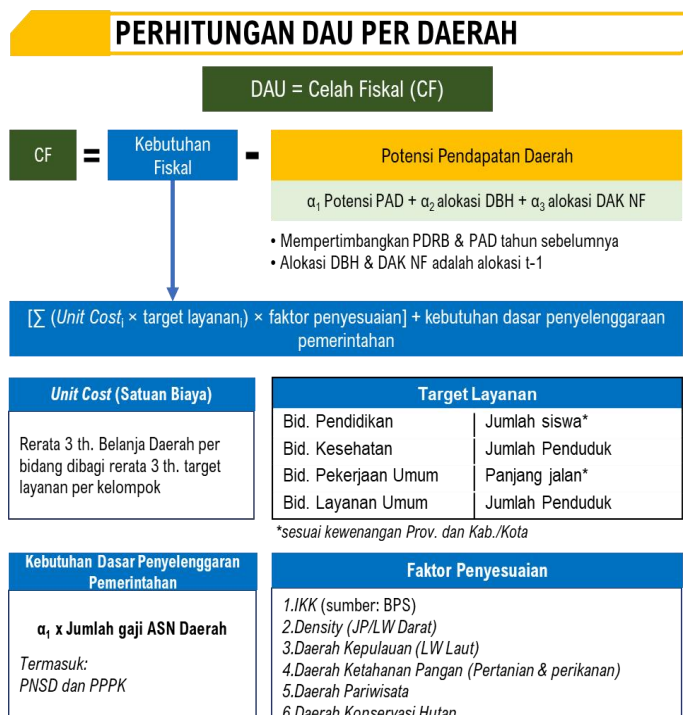
- Pagu DAU tahun 2025 tumbuh sebesar 4,4% dari tahun 2024.

KEBIJAKAN DAU TA 2025

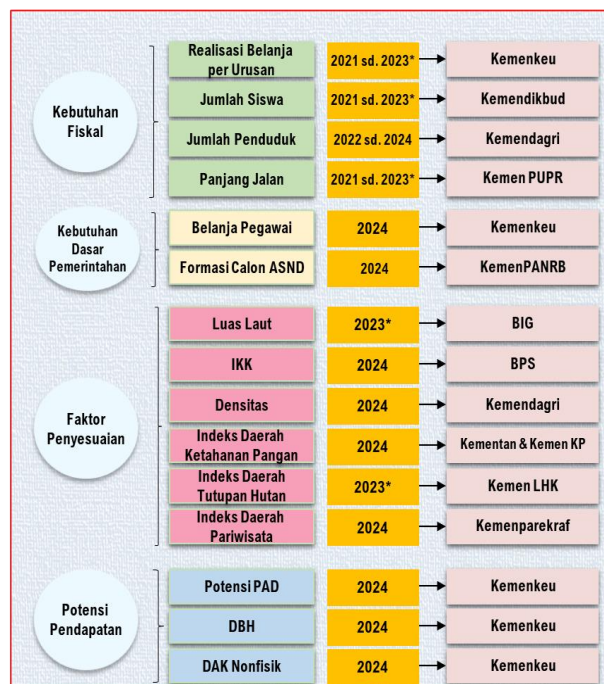
1. Melanjutkan kebijakan pengalokasian DAU diantaranya kebijakan **holdharmless** sampai 2027.
2. Memperkuat penggunaan **earmarking** DAU.
3. Menjaga tingkat **pemerataan keuangan daerah**.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola **earmarking** DAU.
5. Melanjutkan kebijakan penyaluran DAU berbasis **kinerja**.

DATA DASAR & FORMULA DAU TA 2025

Kebijakan formula dan data dasar perhitungan sama dengan tahun sebelumnya



DATA DASAR DAU



PAGU & PERKIRAAN PEMBAGIAN JENIS DAU TA 2025

(miliar rupiah)

NO	DAU	ALOKASI TA. 2024	ALOKASI TA. 2025		
			RUU APBN	Usulan Kesepakatan Panja TKD	SELISIH Usulan Kesepakatan Panja TKD dengan RUU APBN
1	DAU Blockgrant	343.527,6	358.617,9	360.515,9	1.898,1
2	DAU Earmarked	84.171,7	88.015,9	86.117,8	(1.898,1)
	DAU PPPK	15.676,7	17.253,2	15.355,14	(1.898,1)
	DAU Kelurahan	1.699,6	1.699,6	1.699,6	-
	DAU Pelayanan Dasar	66.795,4	69.063,1	69.063,1	-
	Total	427.699,3	446.633,8	446.633,8	0,0



Penambahan alokasi DAU diarahkan untuk dukungan kebijakan penggalangan formasi ASDN yang akan diangkat tahun 2025 melalui DAU Earmarked Penggalangan PPPK 2025, dan dukungan penggalangan PPPK eksisting dalam DAU Blockgrant



Penurunan DAU Earmarked dukungan bidang Pendidikan dipengaruhi oleh peningkatan capaian SPM bidang Pendidikan secara nasional.



Kenaikan DAU Earmarked dukungan bidang Kesehatan sebagai tambahan pendanaan untuk mendukung penurunan prevalensi stunting.



Kenaikan DAU Earmarked dukungan bidang Pekerjaan Umum untuk mendukung anggaran infrastruktur sesuai UU HKPD.



Komposisi DAU Earmark tahun 2025 sebesar 19,3% dari total DAU, lebih rendah jika dibandingkan komposisi DAU Earmark tahun 2024 yang sebesar 19,7% dari total DAU

- terdapat pergeseran Jumlah DAU Penggalangan PPPK ke DAU Yang tidak ditentukan Penggunaanya

PAGU & PERKIRAAN PEMBAGIAN JENIS DAU TA 2025

URAIAN	APBN 2024	RAPBN 2025
THEIL (<i>Weighted</i>) Tanpa DAU	0,21344	0,22857
THEIL (<i>Weighted</i>) Dengan DAU	0,14817	0,14257
Penurunan	- 30,6%	- 37,6%

HASIL PENGHITUNGAN ALOKASI DAU TA. 2025:

- Formula penghitungan alokasi dan data dasar DAU TA. 2025 melanjutkan perhitungan DAU TA. 2024 sesuai formula dalam UU 1/2022;
- Dalam alokasi DAU TA. 2025 telah mempertimbangkan **Kebutuhan Daerah terkait pembayaran gaji dan tunjangan melekat PPPK yang diangkat tahun 2024.**
- Hasil perhitungan alokasi DAU TA. 2025 berhasil menurunkan **indeks Theil sebesar – 37,6 %** dari tanpa DAU sebesar 0,22857 menjadi 0,14257 dengan DAU.
- Sebagian alokasi DAU per daerah akan ditentukan penggunaannya, antara lain **untuk penggajian PPPK, pendanaan Kelurahan, dan peningkatan layanan bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum.**

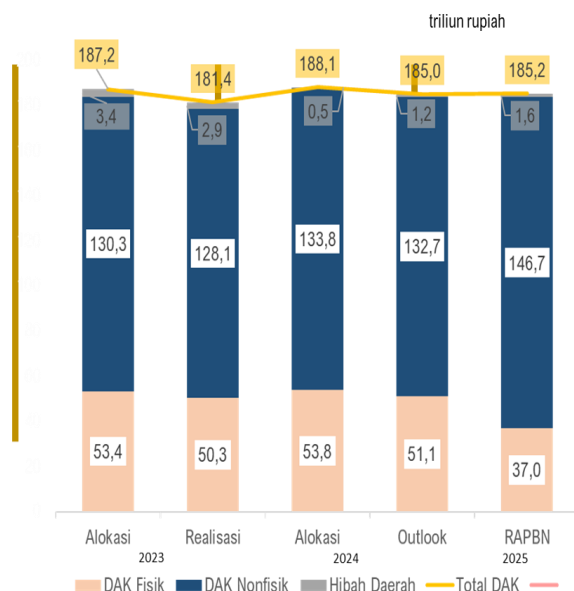
Kebijakan perhitungan alokasi

Penyesuaian alokasi DAU setiap Daerah

- Seluruh Daerah mendapatkan kenaikan alokasi minimal sebesar 2,5% dari alokasi tahun 2024 dan maksimal kenaikan 10% dari alokasi tahun 2024
- Dari penyesuaian tersebut diperoleh hasil:
 - Seluruh Daerah Provinsi mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 dengan rata-rata kenaikan sebesar 4.04 %
 - Seluruh Daerah Kabupaten/Kota mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 dengan rata-rata kenaikan sebesar 4.05 %

PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DAK TA 2025

PERKEMBANGAN DAK TA 2023-2025



- Pagu DAK tahun 2025 turun terutama karena pembangunan/rehabilitasi sekolah/kelas di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat agar seluruh siswa/guru di Indonesia dapat menikmati standar kualitas pendidikan yang sama

KEBIJAKAN DAK TA 2025

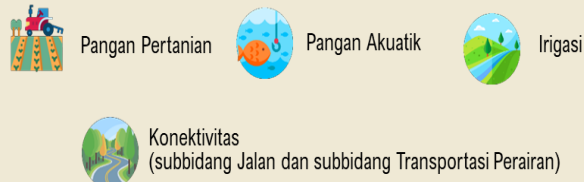
- DAK Fisik:** penyediaan **sarana-prasarana fisik layanan dasar** antara lain bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar.
- DAK Nonfisik:** **pendanaan operasional layanan publik terutama** bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, pertanian, Sentra Industri dan Koperasi UMK.
- Hibah ke Daerah:** mendukung **transportasi perkotaan**, produksi pertanian di dataran tinggi/*upland*, pelestarian lingkungan hidup, serta pemulihan infrastruktur pasca bencana.
- Matching program** dan **sinergi pendanaan.**
- Meningkatkan kualitas pengelolaan DAK.**

DUKUNGAN, TEMA, & BIDANG DAK FISIK TA 2025

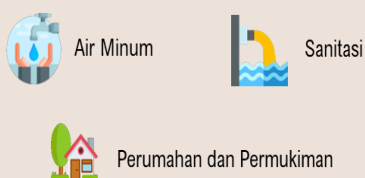
DAK Fisik Layanan Dasar



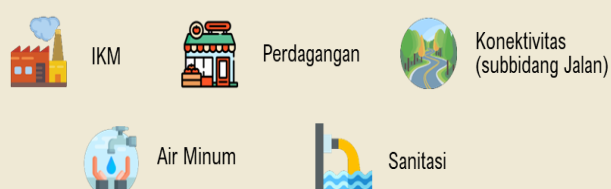
Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN)



Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu

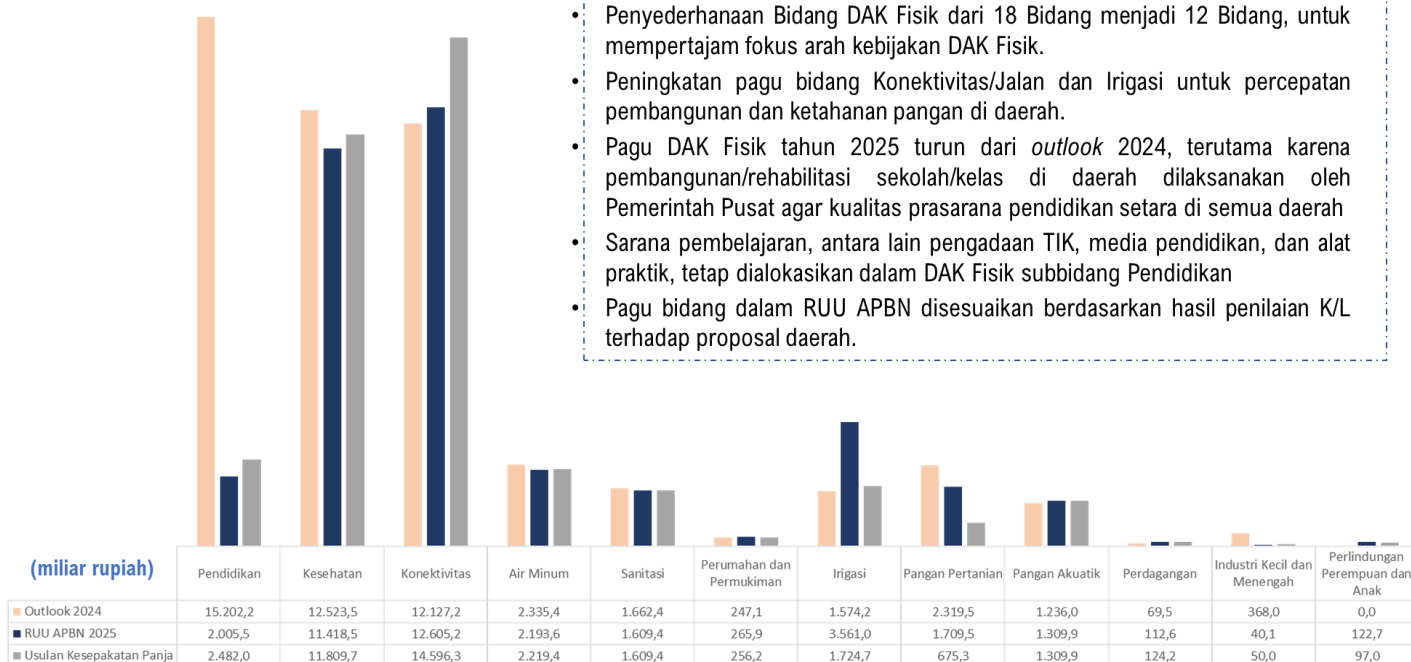


Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri



POSTUR DAK FISIK TA 2025

- Penyederhanaan Bidang DAK Fisik dari 18 Bidang menjadi 12 Bidang, untuk mempertajam fokus arah kebijakan DAK Fisik.
- Peningkatan pagu bidang Konektivitas/Jalan dan Irigasi untuk percepatan pembangunan dan ketahanan pangan di daerah.
- Pagu DAK Fisik tahun 2025 turun dari *outlook* 2024, terutama karena pembangunan/rehabilitasi sekolah/kelas di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat agar kualitas prasarana pendidikan setara di semua daerah
- Sarana pembelajaran, antara lain pengadaan TIK, media pendidikan, dan alat praktik, tetap dialokasikan dalam DAK Fisik subbidang Pendidikan
- Pagu bidang dalam RUU APBN disesuaikan berdasarkan hasil penilaian K/L terhadap proposal daerah.



POSTUR DAK FISIK TA 2025

(Miliar Rupiah)

No	Bidang	Outlook 2024	APBN 2025		Selisih
			RUU	2025	
				Usulan/Kesepakatan Panja TKD	
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Pendidikan	15.202,2	2.005,5	2.482,0	476,5
2	Kesehatan	12.523,5	11.418,5	11.809,7	391,2
3	Konektivitas (Jalan+Transportasi Perairan)	12.127,2	12.605,2	14.596,3	
	- Sub Bidang Jalan	11.777,6	12.205,2	14.258,7	2.053,4
	- Sub Bidang Transportasi Perairan	349,6	399,9	337,6	-62,3
4	Air Minum	2.335,4	2.193,6	2.219,4	25,8
5	Sanitasi	1.662,4	1.609,4	1.609,4	-
6	Irigasi	1.574,2	3.561,0	1.724,7	-1.836,3
7	Perlindungan Perempuan dan Anak	-	122,7	97,0	-25,7
8	Perumahan dan Permukiman	247,1	265,9	256,2	-9,7
9	Pangan Pertanian	2.319,5	1.709,5	675,3	-1.034,2
10	Kelautan dan Perikanan/Pangan Akuatik	1.236,0	1.309,9	1.309,9	-
11	Perdagangan	69,5	112,6	124,2	11,6
12	Industri Kecil dan Menengah	368,0	40,1	50,0	9,9
	Lainnya	1.477,3	-	-	-
TOTAL DAK FISIK		51.142,5	36.953,9	36.953,9	-

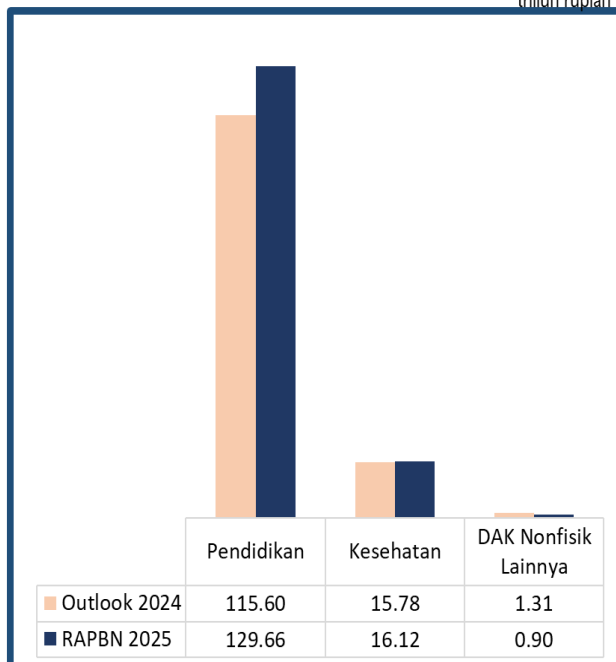
Berdasarkan penilaian atas usulan daerah dilakukan penyesuaian pagu bidang/sub bidang sebagai berikut:

- Pagu bidang irigasi, perumahan permukiman, perlindungan perempuan dan anak, serta pangan pertanian diturunkan sesuai hasil penilaian.
- Sisa pagu hasil penilaian dialihkan sesuai dengan prioritas pembangunan terutama ke bidang Pendidikan (Rp476 M), Kesehatan (Rp391 M), dan Jalan (Rp2,1 T)

POSTUR DAK NONFISIK TA 2025

PERKEMBANGAN DAK NON FISIK TA 2024-2025

triliun rupiah



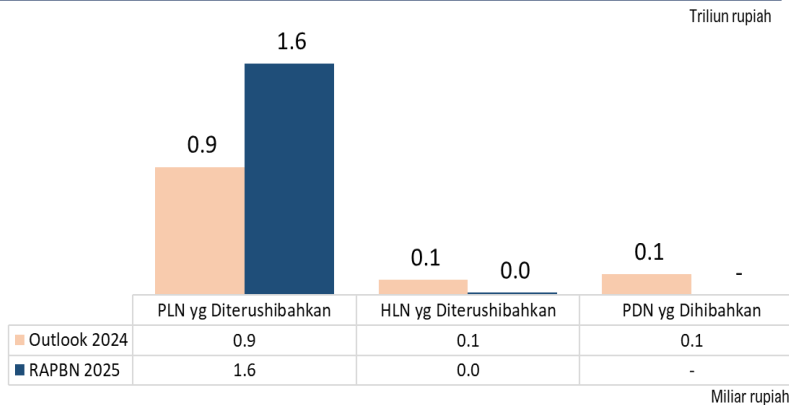
Simplifikasi Jenis dari sebelumnya 16 menjadi 14 jenis, dengan penambahan Pagu DAK Nonfisik karena:

- kenaikan jumlah guru bersertifikat, dan
- kenaikan sasaran terutama BOSP, PK2UMK, dan Pertanian.

No.	Rincian DAK NonFisik	Miliar rupiah	
		Outlook APBN 2024	RAPBN 2025
1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	53.865,6	53.491,7
2	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	4.009,1	4.038,7
3	BOP Pendidikan Kesenian	1.618,8	1.741,2
4	Tunjangan Profesi Guru ASND	52.805,5	66.921,6
5	Tambahan Penghasilan Guru ASND	1.219,4	738,2
6	Tunjangan Khusus Guru ASND di Daerah Khusus	1.910,7	2.404,5
7	BOP Museum dan Taman Budaya	170,0	170,0
8	Dana BPP Perpustakaan Daerah	-	150,0
9	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	12.541,8	12.878,7
10	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	3.239,3	3.239,3
11	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK	250,0	163,7
12	Dana Pelayanan Kepariwisata	133,3	0,0
13	Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah	62,7	0,0
14	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	129,9	132,0
15	Dana Fasilitas Penanaman Modal	247,4	0,0
16	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	295,7	516,4
	- Subjenis Pangan		88,4
	- Subjenis Pertanian		211,7
	- Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian		216,3
17	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	194,9	92,0
TOTAL		132.694,1	146.677,9

POSTUR HIBAH DAERAH TA 2025

PERKEMBANGAN HIBAH DAERAH TA 2024-2025



Jenis Hibah kepada Daerah	Outlook 2024	RAPBN 2025 Nota Keuangan	Program/ Kegiatan
A. Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan	881,9	1.594,9	Pertanian, Perhubungan, dan Lingkungan Hidup
B. Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan	102,9	14,1	
C. Penerimaan Dalam Negeri yang Diberikan	142,7	0	
Total	1.127,5	1.609,0	

- Pagu Hibah kepada Daerah TA 2025 dialokasikan untuk 3 jenis Hibah kepada Daerah (Hibah MRT, Hibah UPLAND, dan Hibah BioCF ISFL).
- Kenaikan** pagu Hibah kepada Daerah TA 2025 karena adanya peningkatan alokasi hibah untuk program MRT.

Target Output 2025, antara lain:



PERHUBUNGAN

- Lanjutan pembangunan jalur MRT Koridor Utara-Selatan Fase 2A sepanjang ± 5,8 km.
- Pembangunan jalur MRT Jakarta koridor Timur Barat Fase 1 Tahap 1 sepanjang ± 1,77 km.



PERTANIAN

- Pembangunan jalan usaha tani sepanjang 102 km, terasering lahan seluas 15 ha, bantuan saprodi untuk 3.357 ha, dan pengadaan alsintan sebanyak 2.045 unit

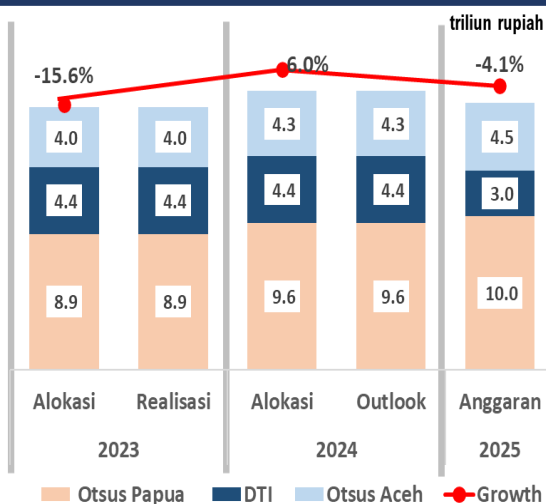


LINGKUNGAN HIDUP

- Mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan sebesar 3 juta ton Co2eq; dan
- Pengelolaan area hutan dan lahan secara berkelanjutan pada 4 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DANA OTSUS & DTI TA 2025

PERKEMBANGAN OTONOMI KHUSUS TA 2023-2025



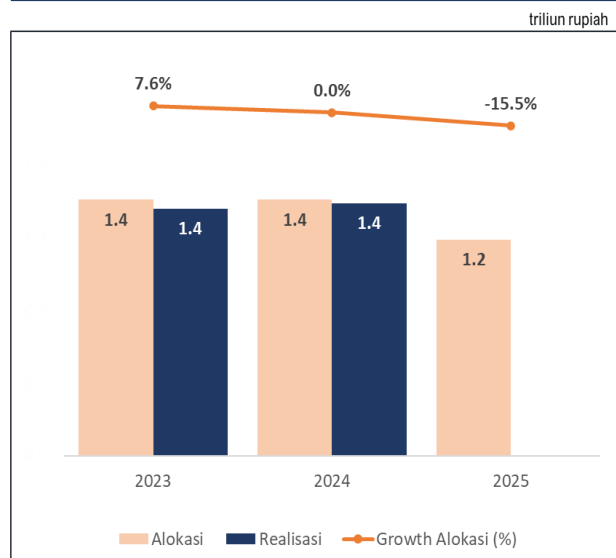
- Pagu Dana Otsus (Aceh dan Papua) TA 2025 meningkat akibat peningkatan pagu DAU.
- Pagu DTI TA 2025 lebih rendah karena strategi pelaksanaan prioritas nasional di daerah serta untuk mendukung TKD *mandatory* diantaranya untuk penggajian P3K.

KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS TA 2025

- Mendorong prioritas penggunaan Dana Otsus, untuk:
 - Penurunan kemiskinan:** perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, penyediaan air bersih, sanitasi lingkungan.
 - Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah:** penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan perhubungan.
 - Mendukung capaian rencana induk** percepatan pembangunan papua untuk mewujudkan papua sehat, papua cerdas, dan papua produktif.
- Meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Otsus** melalui sinergi pendanaan APBN dan APBD guna mendukung pencapaian target pembangunan.
- Meningkatkan kualitas SDM** pengelola Dana Otsus terutama di DOB, melalui asistensi dan pembinaan yang intensif dan berkesinambungan.
- Penggunaan DTI pada DOB, diprioritaskan untuk pembangunan **infrastruktur penunjang** gedung perkantoran.

PERKEMBANGAN & KEBIJAKAN DANA KEISTIMEWAAN DIY TA 2025

PERKEMBANGAN DAIS TA 2023-2025



- Pagu alokasi Dana keistimewaan 2025 lebih rendah karena strategi pelaksanaan prioritas nasional di daerah oleh K/L serta untuk mendukung TKD *mandatory* diantaranya untuk penggajian P3K.

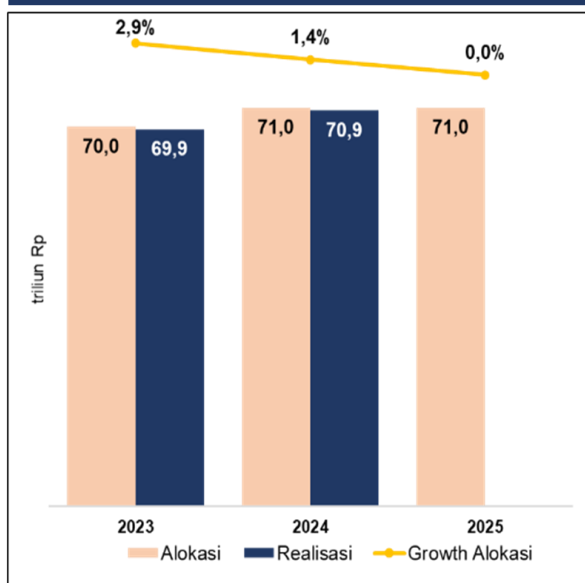
KEBIJAKAN DANA KEISTIMEWAAN DIY TA 2025

- Mengarahkan **penggunaan** Dana Keistimewaan fokus untuk:
 - penurunan tingkat kemiskinan;
 - pemberdayaan masyarakat dan UMKM,
 - peningkatan penyediaan layanan dasar publik,
 - serta mengurangi belanja birokrasi penunjang, administrasi dan pengawasan;
- Meningkatkan **sinergi** dengan Belanja K/L untuk pencapaian **prioritas nasional** dengan mempertimbangkan prioritas daerah.
- Meningkatkan **tata kelola pemanfaatan** Dana Keistimewaan DIY yang inovatif, partisipatif, dan transparan **melalui** pengembangan **sistem informasi yang terintegrasi** secara berkelanjutan.

PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DANA DESA TA 2025

Mengarahkan fokus penggunaan Dana Desa yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat

PERKEMBANGAN DANA DESA TA 2023-2025



*) Outlook realisasi tahun 2024.

- Pagu Dana Desa tahun 2025 naik sebesar 0,2% dari outlook realisasi tahun 2024.

KEBIJAKAN DANA DESA TA 2025

- Mendorong peningkatan kemandirian desa & kualitas tata kelola Dana Desa melalui:
 - penyaluran Dana Desa berdasarkan fokus penggunaan yang ditetapkan,
 - penyaluran Dana Desa secara langsung dari RKUN ke RKD,
 - pemberian *reward* berupa alokasi kinerja dan insentif desa,
 - pemberian *reward* penyaluran Dana Desa lebih besar pada tahap I kepada desa berstatus Mandiri, dan
 - penerapan sanksi terhadap desa yang menyalahgunakan keuangan desa dan tidak mampu menyerap Dana Desa secara optimal.
- Mengarahkan fokus penggunaan Dana Desa melalui:
 - penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT Desa paling tinggi 15%,
 - penguatan desa untuk aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim,
 - promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan desa termasuk stunting,
 - dukungan program ketahanan pangan,
 - pengembangan potensi dan keunggulan desa,
 - percepatan implementasi desa digital,
 - pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal,
 - operasional pemerintah desa paling tinggi 3%, dan/atau
 - program sektor prioritas lainnya di desa.
- Meningkatkan kualitas data keuangan desa berbasis elektronik terintegrasi dalam rangka memperkuat monitoring dan evaluasi.

FORMULA PENGALOKASIAN DANA DESA TA 2025

Pagu Rp71 T dialokasikan kepada 75.259 desa di 434 Kab/Kota

Yang terdiri atas:

A

Sebesar **Rp69 T** pengalokasiannya dihitung sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula = AD + AA + AK + AF



Alokasi Dasar (AD) sebesar 65% dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk



Alokasi Afirmasi (AA) sebesar 1% dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin terbanyak.

Dalam kurun 2022-2024, rata-rata penerima AA untuk Desa Tertinggal sebesar Rp106,6 juta/desa. Untuk Desa Sangat Tertinggal Rp167,2 juta/desa.



Alokasi Kinerja (AK) sebesar 4% (empat persen) dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik. Penilaian AK dilakukan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota

Dalam kurun 2022-2024, rata-rata penerima AK sebesar Rp235,6 juta/desa.



Alokasi Formula (AF) sebesar 30% dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa



B

Sebesar **Rp2 T** dialokasikan dan disalurkan sebagai Insentif Desa pada tahun anggaran berjalan berdasarkan kinerja desa atas peningkatan tata kelola keuangan desa dan penghargaan yang diberikan oleh kementerian/lembaga



Pagu sebesar Rp2T dialokasikan kepada desa berdasarkan pemenuhan Kriteria Utama dan capaian Kriteria Kinerja. **Kriteria Kinerja meliputi:**

1. Kinerja Pemerintahan Desa, yang terdiri dari:
 - o Kinerja Keuangan dan Pembangunan Desa
 - o Tata Kelola Keuangan dan Akuntabilitas Keuangan Desa
2. Penghargaan Kementerian/lembaga

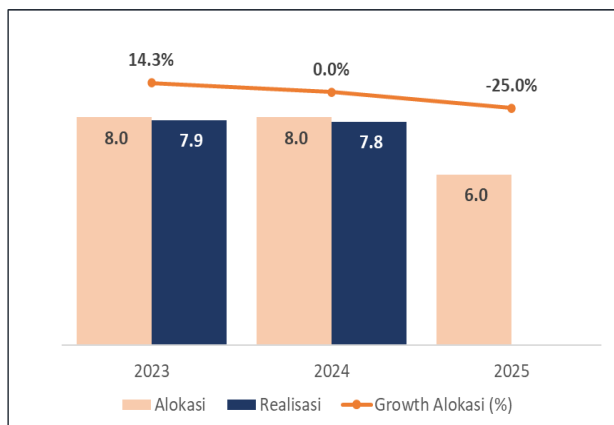


Penyaluran dilakukan terpisah dengan penyaluran pagu berdasarkan formula regular.

PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN INSENTIF FISKAL TA 2025

Mendorong kinerja Pemerintah Daerah dalam meningkatkan tata Kelola APBD

PERKEMBANGAN DANA INSENTIF FISKAL TA 2023-2025



- Outlook penyaluran insentif fiskal 2024 sebesar Rp7,8 triliun, dimana terdapat beberapa daerah yang tidak dapat disalurkan karena tidak memenuhi syarat salur
- Pagu Insentif Fiskal tahun 2025 lebih rendah karena kinerja daerah juga diperhitungkan di alokasi DAU dan DBH serta untuk mendukung TKD *mandatory* diantaranya untuk penggajian P3K.

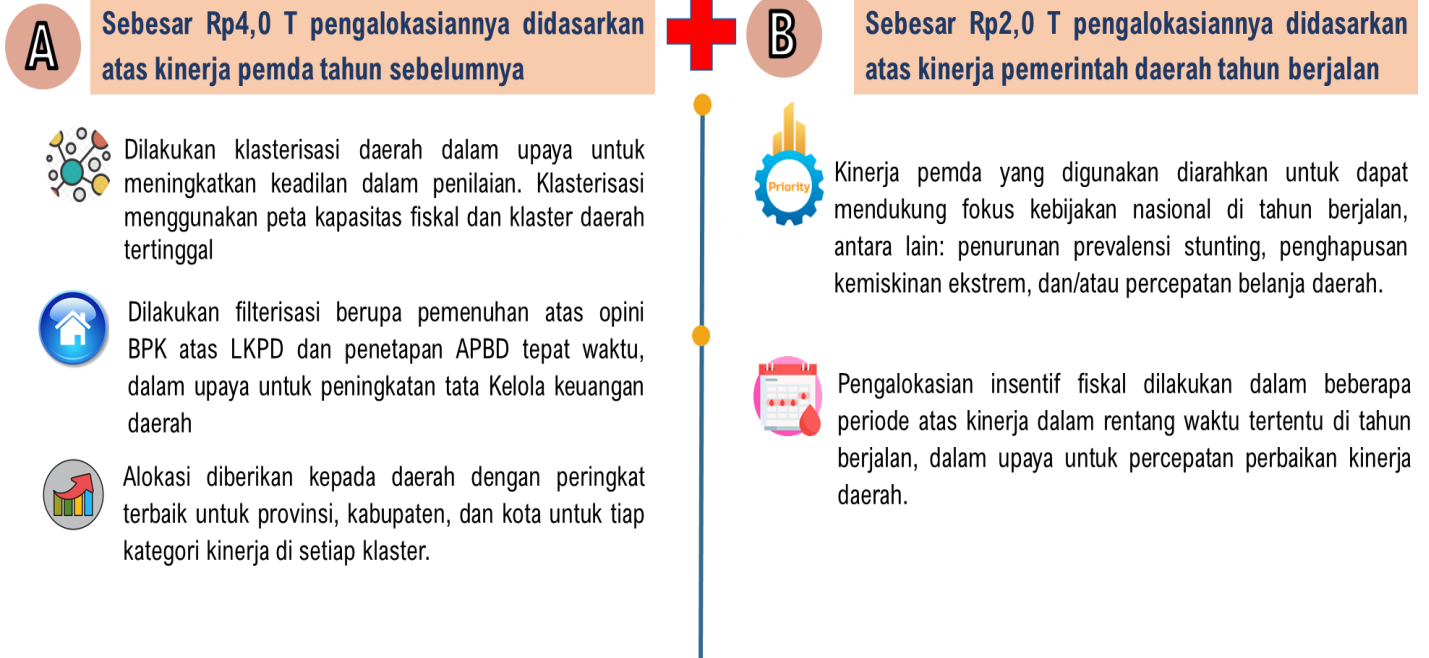
KEBIJAKAN INSENTIF FISKAL TA 2025

1. Pengalokasian berdasarkan **kinerja tahun anggaran sebelumnya** dan **tahun anggaran berjalan**;
2. Indikator kinerja tahun sebelumnya meliputi **pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar**;
3. Indikator kinerja tahun berjalan meliputi dukungan **pencapaian target prioritas nasional**
4. Mendorong peran Insentif Fiskal untuk meningkatkan **kemandirian daerah**, antara lain melalui peningkatan pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau sumber pembiayaan lain.
5. Melanjutkan **pemberian Insentif Fiskal kepada daerah tertinggal** dengan tetap memperhatikan kinerja daerah tertinggal.

FORMULA PENGALOKASIAN INSENTIF FISKAL TA 2025

Pagu Rp6,0 T dialokasikan Atas Kinerja Tahun Sebelumnya dan Tahun Berjalan

Yang terdiri atas:





RINCIAN ALOKASI TRANSFER KE DAERAH TA 2025



REKAPITULASI ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI JAWA TIMUR

(dalam ribuan rupiah)

NO	PEMERINTAH DAERAH	DANA BAGI HASIL	DANA ALOKASI UMUM	DAK FISIK	DAK NONFISIK	HIBAH KE DAERAH	DANA DESA	INSENTIF FISKAL	JUMLAH
1	PROVINSI JAWA TIMUR	5.554.922.429	4.353.854.501	320.708.306	4.001.987.502		-	25.308.240	14.256.780.978
2	KAB. BANGKALAN	56.235.000	1.050.701.257	197.928.600	406.083.564		282.421.820	-	1.993.370.241
3	KAB. BANYUWANGI	195.580.230	1.498.437.888	155.291.231	516.006.245		239.735.550	32.023.746	2.637.074.890
4	KAB. BLITAR	58.174.038	1.203.237.143	22.526.101	381.457.717		239.462.348	7.699.226	1.912.556.573
5	KAB. BOJONEGORO	2.802.926.285	1.004.658.960	524.900	424.990.600		397.014.083	14.541.148	4.644.655.976
6	KAB. BONDOWOSO	69.962.246	928.003.902	11.972.513	307.070.806		210.955.510	-	1.527.964.977
7	KAB. GRESIK	255.700.805	979.891.013	142.047.927	399.270.194		316.480.417	22.200.037	2.115.590.393
8	KAB. JEMBER	101.308.053	1.881.644.909	26.963.170	641.161.682		321.139.649	7.026.762	2.979.244.225
9	KAB. JOMBANG	185.839.326	1.105.348.802	9.985.970	378.188.680		312.924.256	16.166.983	2.008.454.017
10	KAB. KEDIRI	67.635.963	1.275.838.187	37.496.166	453.432.344		372.746.004	15.234.136	2.222.382.800
11	KAB. LAMONGAN	188.716.058	1.290.031.811	37.628.995	422.633.092		412.589.909	28.609.579	2.380.209.444
12	KAB. LUMAJANG	59.006.860	988.958.800	44.275.405	327.297.947		219.002.212	22.999.212	1.661.540.436
13	KAB. MADIUN	184.818.714	908.864.115	17.422.851	246.251.692		192.759.795	22.517.566	1.572.634.733
14	KAB. MAGETAN	53.540.706	975.271.567	36.507.612	255.120.353		188.322.845	15.228.821	1.523.991.904
15	KAB. MALANG	94.207.345	1.932.402.330	35.259.098	721.091.826	11.035.000	460.060.995	15.545.585	3.269.602.179
16	KAB. MOJOKERTO	77.636.406	993.590.423	28.506.487	339.787.355		294.504.331	15.638.992	1.749.663.994
17	KAB. NGANJUK	184.968.133	1.143.957.983	61.621.561	402.018.629		266.062.441	14.823.812	2.073.452.559
18	KAB. NGAWI	183.530.897	1.086.335.614	174.252.271	295.793.050		224.701.925	15.510.935	1.980.124.692
19	KAB. PACITAN	52.044.567	825.211.109	72.870.029	249.772.693		164.996.136	14.701.780	1.379.596.314
20	KAB. PAMEKASAN	55.423.489	893.745.807	43.158.940	308.835.886		191.972.621	23.417.922	1.516.554.665
21	KAB. PASURUAN	109.140.758	1.311.189.980	18.839.330	512.696.843		352.583.801	-	2.304.450.712
22	KAB. PONOROGO	59.322.187	1.111.705.565	33.933.596	334.336.262		261.694.868	15.070.888	1.816.063.366
23	KAB. PROBOLINGGO	62.669.589	1.058.617.650	49.897.524	360.123.969		327.771.213	7.167.295	1.866.247.240
24	KAB. SAMPANG	52.231.912	862.725.238	52.191.051	344.670.809		214.069.079	7.848.369	1.533.736.458
25	KAB. SIDOARJO	180.798.998	1.326.555.659	28.549.836	591.607.734		340.770.181	14.436.672	2.482.719.080

REKAPITULASI ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI JAWA TIMUR

(dalam ribuan rupiah)

NO	PEMERINTAH DAERAH	DANA BAGI HASIL	DANA ALOKASI UMUM	DAK FISIK	DAK NONFISIK	HIBAH KE DAERAH	DANA DESA	INSENTIF FISKAL	JUMLAH
26	KAB. SITUBONDO	69.648.264	821.205.100	12.953.699	259.732.949		144.895.257	15.308.361	1.323.743.630
27	KAB. SUMENEP	64.612.377	1.197.280.056	193.249.534	351.584.255	12.501.000	335.590.446	7.006.290	2.161.823.958
28	KAB. TRENGGALEK	54.727.977	929.975.022	37.181.851	256.532.668		163.308.540	31.803.056	1.473.529.114
29	KAB. TUBAN	512.314.002	1.093.092.737	69.474.977	407.629.316		307.052.105	-	2.389.563.137
30	KAB. TULUNGAGUNG	62.364.612	1.187.416.064	46.047.768	393.391.241		255.226.307	6.635.743	1.951.081.735
31	KOTA BLITAR	53.702.747	456.999.804	658.260	65.023.657		-	-	576.384.468
32	KOTA KEDIRI	84.567.171	637.504.735	9.786.395	113.535.859		-	8.108.479	853.502.639
33	KOTA MADIUN	64.104.234	530.628.223	4.567.123	87.068.882		-	29.310.921	715.679.383
34	KOTA MALANG	106.959.832	882.591.002	34.066.061	266.399.764		-	7.099.711	1.297.116.370
35	KOTA MOJOKERTO	56.073.791	427.129.664	1.823.662	68.379.111		-	-	553.406.228
36	KOTA PASURUAN	54.647.177	465.498.079	6.296.137	84.429.518		-	-	610.870.911
37	KOTA PROBOLINGGO	54.812.984	493.967.926	5.851.647	88.259.724		-	14.589.713	657.481.994
38	KOTA SURABAYA	589.164.624	1.464.317.602	13.300.000	753.502.209		-	29.182.181	2.849.466.616
39	KOTA BATU	53.018.054	511.190.380	1.049.909	78.480.963		22.944.352	8.261.815	674.945.473
JUMLAH		12.827.058.840	43.089.576.607	2.096.666.493	16.895.637.590	23.536.000	8.033.758.996	531.023.976	83.497.258.502

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 PROVINSI JAWA TIMUR

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	14.256.780.978
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	5.554.922.429
1. DBH Pajak	4.843.690.254
a. Pajak Penghasilan	1.034.248.716
b. Pajak Bumi dan Bangunan	231.448.152
c. Cukai Hasil Tembakau	3.577.993.386
2. DBH Sumber Daya Alam	711.232.175
a. Migas	660.073.598
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	47.686.887
c. Kehutanan	3.181.422
d. Perikanan	-
e. Panas Bumi	290.268
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	4.353.854.501
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	3.874.696.706
2. DAU ditentukan penggunaannya	479.157.795
a. Penggajian Formasi PPPK	77.499.870
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	320.640.730
d. Bidang Kesehatan	59.026.467
e. Bidang Pekerjaan Umum	21.990.728
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	4.322.695.808
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	320.708.306
a. Pendidikan	124.350.627
b. Kesehatan	17.513.000
c. Konektivitas	40.193.944
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	52.459.546
h. Pangan Pertanian	37.767.957
i. Pangan Akuatik	39.900.010
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	6.400.000
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	2.123.222
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	4.001.987.502
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	2.371.208.480
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	1.580.234.941
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	3.636.528
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	21.041.815
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	200.000
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	1.084.918
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	18.607.660
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	450.000
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	5.122.500
D. Dana Desa	-
E. Insentif Fiskal	25.308.240

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. BANGKALAN

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.993.370.241
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	56.235.000
1. DBH Pajak	25.114.717
a. Pajak Penghasilan	19.212.452
b. Pajak Bumi dan Bangunan	5.902.265
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	31.120.283
a. Migas	28.250.887
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.578.910
c. Kehutanan	83.399
d. Perikanan	1.197.383
e. Panas Bumi	9.704
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.050.701.257
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	829.991.895
2. DAU ditentukan penggunaannya	220.709.362
a. Penggajian Formasi PPPK	14.635.767
b. Pendanaan Kelurahan	1.600.000
c. Bidang Pendidikan	129.263.528
d. Bidang Kesehatan	46.113.213
e. Bidang Pekerjaan Umum	29.096.854
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	604.012.164
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	197.928.600
a. Pendidikan	11.378.795
b. Kesehatan	16.443.338
c. Konektivitas	139.777.564
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	10.536.111
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	5.410.224
h. Pangan Pertanian	14.382.568
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	406.083.564
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	165.640.530
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	186.035.026
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	952.035
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	35.914.880
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	11.039.948
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	789.000
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.712.145
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	282.421.820
E. Insentif Fiskal	-

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. BANYUWANGI

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	2.637.074.890
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	195.580.230
1. DBH Pajak	67.525.743
a. Pajak Penghasilan	29.057.002
b. Pajak Bumi dan Bangunan	38.468.741
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	128.054.487
a. Migas	28.069.746
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	97.301.987
c. Kehutanan	742.185
d. Perikanan	1.773.993
e. Panas Bumi	166.576
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.498.437.888
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.310.809.086
2. DAU ditentukan penggunaannya	187.628.802
a. Penggajian Formasi PPPK	14.264.065
b. Pendanaan Kelurahan	5.600.000
c. Bidang Pendidikan	44.588.541
d. Bidang Kesehatan	67.413.773
e. Bidang Pekerjaan Umum	55.762.423
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	671.297.476
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	155.291.231
a. Pendidikan	16.367.118
b. Kesehatan	66.464.201
c. Konektivitas	59.197.713
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	1.889.752
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	4.324.507
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	7.047.940
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	516.006.245
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	213.462.290
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	252.951.167
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	473.907
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	33.820.084
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	14.798.797
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	500.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	239.735.550
E. Insentif Fiskal	32.023.746

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. BLITAR

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.912.556.573
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	58.174.038
1. DBH Pajak	27.821.749
a. Pajak Penghasilan	17.733.059
b. Pajak Bumi dan Bangunan	10.088.690
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	30.352.289
a. Migas	27.496.894
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.580.675
c. Kehutanan	264.130
d. Perikanan	1.000.192
e. Panas Bumi	10.398
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.203.237.143
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.089.816.571
2. DAU ditentukan penggunaannya	113.420.572
a. Penggajian Formasi PPPK	26.204.992
b. Pendanaan Kelurahan	5.600.000
c. Bidang Pendidikan	34.254.491
d. Bidang Kesehatan	28.580.297
e. Bidang Pekerjaan Umum	18.780.792
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	403.983.818
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	22.526.101
a. Pendidikan	2.809.324
b. Kesehatan	15.159.939
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	4.556.838
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	381.457.717
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	121.026.890
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	217.938.889
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	646.159
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	27.696.313
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	12.998.806
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	750.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	239.462.348
E. Insentif Fiskal	7.699.226

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. BOJONEGORO

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	4.644.655.976
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	2.802.926.285
1. DBH Pajak	855.881.350
a. Pajak Penghasilan	29.218.895
b. Pajak Bumi dan Bangunan	826.662.455
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	1.947.044.935
a. Migas	1.943.849.252
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.614.034
c. Kehutanan	720.567
d. Perikanan	851.176
e. Panas Bumi	9.906
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.004.658.960
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	818.986.442
2. DAU ditentukan penggunaannya	185.672.518
a. Penggajian Formasi PPPK	92.948.735
b. Pendanaan Kelurahan	2.200.000
c. Bidang Pendidikan	31.814.622
d. Bidang Kesehatan	49.839.124
e. Bidang Pekerjaan Umum	8.870.037
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	425.515.500
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	524.900
a. Pendidikan	524.900
b. Kesehatan	-
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	424.990.600
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	132.069.420
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	246.354.129
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	34.568.329
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	11.998.722
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	397.014.083
E. Insentif Fiskal	14.541.148

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KAB. BONDOWOSO

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.527.964.977
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	69.962.246
1. DBH Pajak	27.381.049
a. Pajak Penghasilan	17.525.179
b. Pajak Bumi dan Bangunan	9.855.870
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	42.581.197
a. Migas	27.496.894
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	13.387.139
c. Kehutanan	534.383
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	328.976
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	928.003.902
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	739.120.385
2. DAU ditentukan penggunaannya	188.883.517
a. Penggajian Formasi PPPK	8.130.982
b. Pendanaan Kelurahan	2.000.000
c. Bidang Pendidikan	58.990.514
d. Bidang Kesehatan	58.064.485
e. Bidang Pekerjaan Umum	61.697.536
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	319.043.319
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	11.972.513
a. Pendidikan	1.707.109
b. Kesehatan	5.968.385
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	4.297.019
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	307.070.806
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	96.603.283
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	163.912.592
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	35.084.371
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	10.569.900
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	500.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	210.955.510
E. Insentif Fiskal	-

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. GRESIK

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	2.115.590.393
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	255.700.805
1. DBH Pajak	193.339.155
a. Pajak Penghasilan	130.007.825
b. Pajak Bumi dan Bangunan	63.331.330
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	62.361.650
a. Migas	59.208.739
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.601.057
c. Kehutanan	120.570
d. Perikanan	1.419.074
e. Panas Bumi	12.210
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	979.891.013
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	896.467.938
2. DAU ditentukan penggunaannya	83.423.075
a. Penggajian Formasi PPPK	13.358.041
b. Pendanaan Kelurahan	5.200.000
c. Bidang Pendidikan	34.734.009
d. Bidang Kesehatan	23.940.362
e. Bidang Pekerjaan Umum	6.190.663
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	541.318.121
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	142.047.927
a. Pendidikan	10.874.575
b. Kesehatan	6.117.856
c. Konektivitas	27.714.913
d. Air Minum	15.379.918
e. Sanitasi	10.983.576
f. Perumahan dan Permukiman	18.898.113
g. Irigasi	5.078.976
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	17.000.000
k. Perdagangan	30.000.000
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	399.270.194
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	177.264.000
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	173.523.099
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	535.975
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	28.262.824
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	12.189.200
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	3.763.906
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	3.225.500
D. Dana Desa	316.480.417
E. Insentif Fiskal	22.200.037

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. JEMBER

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	2.979.244.225
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	101.308.053
1. DBH Pajak	58.398.368
a. Pajak Penghasilan	37.139.131
b. Pajak Bumi dan Bangunan	21.259.237
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	42.909.685
a. Migas	27.496.894
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	13.390.170
c. Kehutanan	594.388
d. Perikanan	1.374.053
e. Panas Bumi	54.180
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.881.644.909
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.571.441.711
2. DAU ditentukan penggunaannya	310.203.198
a. Penggajian Formasi PPPK	46.462.752
b. Pendanaan Kelurahan	4.400.000
c. Bidang Pendidikan	118.697.849
d. Bidang Kesehatan	87.695.129
e. Bidang Pekerjaan Umum	52.947.468
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	668.124.852
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	26.963.170
a. Pendidikan	2.990.514
b. Kesehatan	18.978.121
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	4.994.535
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	641.161.682
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	287.689.320
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	291.921.740
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	38.525.125
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	22.624.837
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	321.139.649
E. Insentif Fiskal	7.026.762

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. JOMBANG

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	2.008.454.017
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	185.839.326
1. DBH Pajak	31.566.448
a. Pajak Penghasilan	24.521.564
b. Pajak Bumi dan Bangunan	7.044.884
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	154.272.878
a. Migas	151.583.459
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.578.910
c. Kehutanan	263.800
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	12.904
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.105.348.802
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	988.488.553
2. DAU ditentukan penggunaannya	116.860.249
a. Penggajian Formasi PPPK	8.381.881
b. Pendanaan Kelurahan	800.000
c. Bidang Pendidikan	67.053.746
d. Bidang Kesehatan	26.597.657
e. Bidang Pekerjaan Umum	14.026.965
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	388.174.650
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	9.985.970
a. Pendidikan	228.000
b. Kesehatan	693.985
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	6.910.514
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	2.153.471
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	378.188.680
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	147.174.260
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	185.688.114
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	32.024.042
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	12.289.183
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	612.421
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	312.924.256
E. Insentif Fiskal	16.166.983

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. KEDIRI

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	2.222.382.800
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	67.635.963
1. DBH Pajak	37.460.863
a. Pajak Penghasilan	25.613.798
b. Pajak Bumi dan Bangunan	11.847.065
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	30.175.100
a. Migas	27.496.894
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.579.896
c. Kehutanan	254.107
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	10.398
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.275.838.187
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.170.188.594
2. DAU ditentukan penggunaannya	105.649.593
a. Penggajian Formasi PPPK	19.746.670
b. Pendanaan Kelurahan	200.000
c. Bidang Pendidikan	41.771.948
d. Bidang Kesehatan	30.652.610
e. Bidang Pekerjaan Umum	13.278.365
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	490.928.510
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	37.496.166
a. Pendidikan	1.975.313
b. Kesehatan	2.500.000
c. Konektivitas	17.316.868
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	6.836.471
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	5.471.264
h. Pangan Pertanian	3.396.250
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	453.432.344
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	182.194.290
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	211.588.565
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	34.117.898
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	17.750.561
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	7.781.030
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	372.746.004
E. Insentif Fiskal	15.234.136

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KAB. LAMONGAN

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	2.380.209.444
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	188.716.058
1. DBH Pajak	30.635.474
a. Pajak Penghasilan	21.936.824
b. Pajak Bumi dan Bangunan	8.698.650
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	158.080.584
a. Migas	155.166.466
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.583.541
c. Kehutanan	335.885
d. Perikanan	982.482
e. Panas Bumi	12.210
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.290.031.811
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.092.349.327
2. DAU ditentukan penggunaannya	197.682.484
a. Penggajian Formasi PPPK	70.646.614
b. Pendanaan Kelurahan	2.400.000
c. Bidang Pendidikan	39.766.415
d. Bidang Kesehatan	65.689.324
e. Bidang Pekerjaan Umum	19.180.131
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	460.262.087
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	37.628.995
a. Pendidikan	3.227.740
b. Kesehatan	2.500.000
c. Konektivitas	20.749.219
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	6.290.077
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	4.861.959
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	422.633.092
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	137.093.200
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	233.563.474
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	544.910
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	33.806.387
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	16.836.121
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	789.000
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	412.589.909
E. Insentif Fiskal	28.609.579

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KAB. LUMAJANG

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.661.540.436
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	59.006.860
1. DBH Pajak	28.639.594
a. Pajak Penghasilan	18.586.922
b. Pajak Bumi dan Bangunan	10.052.672
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	30.367.266
a. Migas	27.496.894
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.580.392
c. Kehutanan	298.472
d. Perikanan	981.110
e. Panas Bumi	10.398
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	988.958.800
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	836.570.285
2. DAU ditentukan penggunaannya	152.388.515
a. Penggajian Formasi PPPK	15.170.089
b. Pendanaan Kelurahan	1.400.000
c. Bidang Pendidikan	62.428.437
d. Bidang Kesehatan	46.293.016
e. Bidang Pekerjaan Umum	27.096.973
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	371.573.352
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	44.275.405
a. Pendidikan	851.783
b. Kesehatan	6.804.921
c. Konektivitas	19.000.000
d. Air Minum	1.338.076
e. Sanitasi	2.134.900
f. Perumahan dan Permukiman	4.241.811
g. Irigasi	9.903.914
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	327.297.947
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	130.667.500
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	155.070.487
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	700.000
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	30.396.718
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	10.463.242
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	219.002.212
E. Insentif Fiskal	22.999.212

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. MADIUN

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.572.634.733
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	184.818.714
1. DBH Pajak	27.213.222
a. Pajak Penghasilan	17.770.508
b. Pajak Bumi dan Bangunan	9.442.714
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	157.605.492
a. Migas	154.741.449
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.611.836
c. Kehutanan	391.125
d. Perikanan	851.176
e. Panas Bumi	9.906
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	908.864.115
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	831.753.185
2. DAU ditentukan penggunaannya	77.110.930
a. Penggajian Formasi PPPK	12.591.406
b. Pendanaan Kelurahan	1.600.000
c. Bidang Pendidikan	24.178.306
d. Bidang Kesehatan	21.059.920
e. Bidang Pekerjaan Umum	17.681.298
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	263.674.543
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	17.422.851
a. Pendidikan	649.944
b. Kesehatan	2.247.000
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	144.000
e. Sanitasi	7.394.426
f. Perumahan dan Permukiman	4.261.402
g. Irigasi	2.726.079
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	246.251.692
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	71.617.000
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	141.134.588
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	24.353.959
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	8.296.800
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	849.345
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	192.759.795
E. Insentif Fiskal	22.517.566

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. MAGETAN

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.523.991.904
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	53.540.706
1. DBH Pajak	23.497.654
a. Pajak Penghasilan	18.599.888
b. Pajak Bumi dan Bangunan	4.897.766
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	30.043.052
a. Migas	27.496.894
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.579.663
c. Kehutanan	122.986
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	9.704
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	975.271.567
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	881.637.994
2. DAU ditentukan penggunaannya	93.633.573
a. Penggajian Formasi PPPK	23.231.376
b. Pendanaan Kelurahan	5.600.000
c. Bidang Pendidikan	28.170.215
d. Bidang Kesehatan	23.726.561
e. Bidang Pekerjaan Umum	12.905.421
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	291.627.965
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	36.507.612
a. Pendidikan	849.961
b. Kesehatan	6.351.958
c. Konektivitas	20.199.250
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	5.800.645
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	2.105.798
h. Pangan Pertanian	1.200.000
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	255.120.353
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	71.193.000
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	148.508.835
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	25.395.513
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	8.923.005
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	1.100.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	188.322.845
E. Insentif Fiskal	15.228.821

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. MALANG



(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	3.269.602.179
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	94.207.345
1. DBH Pajak	63.378.176
a. Pajak Penghasilan	41.996.312
b. Pajak Bumi dan Bangunan	21.381.864
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	30.829.169
a. Migas	27.496.894
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.579.315
c. Kehutanan	529.506
d. Perikanan	1.187.583
e. Panas Bumi	35.871
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.932.402.330
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.621.992.243
2. DAU ditentukan penggunaannya	310.410.087
a. Penggajian Formasi PPPK	114.818.753
b. Pendanaan Kelurahan	2.400.000
c. Bidang Pendidikan	66.355.212
d. Bidang Kesehatan	92.881.638
e. Bidang Pekerjaan Umum	33.954.484
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	756.350.924
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	35.259.098
a. Pendidikan	5.712.736
b. Kesehatan	9.149.960
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	8.945.382
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	9.593.344
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	721.091.826
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	323.736.600
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	332.419.924
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	700.000
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	39.841.228
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	24.394.074
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Hibah ke Daerah	11.035.000
1. Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan	11.035.000
2. Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan	-
E. Dana Desa	460.060.995
F. Insentif Fiskal	15.545.585

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KAB. MOJOKERTO

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.749.663.994
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	77.636.406
1. DBH Pajak	44.498.825
a. Pajak Penghasilan	37.893.015
b. Pajak Bumi dan Bangunan	6.605.810
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	33.137.581
a. Migas	30.441.498
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.592.254
c. Kehutanan	199.523
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	70.501
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	993.590.423
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	914.040.138
2. DAU ditentukan penggunaannya	79.550.285
a. Penggajian Formasi PPPK	9.919.798
b. Pendanaan Kelurahan	1.000.000
c. Bidang Pendidikan	31.587.801
d. Bidang Kesehatan	23.087.377
e. Bidang Pekerjaan Umum	13.955.309
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	368.293.842
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	28.506.487
a. Pendidikan	1.343.794
b. Kesehatan	14.624.000
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	3.782.382
f. Perumahan dan Permukiman	5.761.036
g. Irigasi	2.995.275
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	339.787.355
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	122.955.720
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	176.857.615
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	25.336.343
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	12.374.900
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	750.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	1.512.777
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	294.504.331
E. Insentif Fiskal	15.638.992

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. NGANJUK

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	2.073.452.559
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	184.968.133
1. DBH Pajak	30.564.427
a. Pajak Penghasilan	22.491.005
b. Pajak Bumi dan Bangunan	8.073.422
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	154.403.706
a. Migas	151.583.459
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.596.617
c. Kehutanan	380.121
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	9.704
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.143.957.983
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.019.243.279
2. DAU ditentukan penggunaannya	124.714.704
a. Penggajian Formasi PPPK	4.274.573
b. Pendanaan Kelurahan	4.000.000
c. Bidang Pendidikan	70.841.006
d. Bidang Kesehatan	25.749.259
e. Bidang Pekerjaan Umum	19.849.866
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	463.640.190
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	61.621.561
a. Pendidikan	2.118.835
b. Kesehatan	23.125.787
c. Konektivitas	25.466.130
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	6.598.933
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	3.027.819
h. Pangan Pertanian	1.284.057
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	402.018.629
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	126.770.550
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	240.219.864
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	765.805
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	17.291.679
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	10.716.726
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	750.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.103.345
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	266.062.441
E. Insentif Fiskal	14.823.812

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. NGAWI

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.980.124.692
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	183.530.897
1. DBH Pajak	28.780.852
a. Pajak Penghasilan	18.936.276
b. Pajak Bumi dan Bangunan	9.844.576
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	154.750.045
a. Migas	151.798.755
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.578.910
c. Kehutanan	528.871
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	9.704
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.086.335.614
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.004.084.444
2. DAU ditentukan penggunaannya	82.251.170
a. Penggajian Formasi PPPK	10.221.805
b. Pendanaan Kelurahan	800.000
c. Bidang Pendidikan	31.236.114
d. Bidang Kesehatan	26.824.293
e. Bidang Pekerjaan Umum	13.168.958
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	470.045.321
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	174.252.271
a. Pendidikan	1.305.995
b. Kesehatan	6.543.164
c. Konektivitas	136.038.639
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	15.064.473
h. Pangan Pertanian	15.300.000
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	295.793.050
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	90.087.930
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	164.288.040
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	657.090
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	30.102.993
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	9.256.337
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	1.000.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	224.701.925
E. Insentif Fiskal	15.510.935

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. PACITAN

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.379.596.314
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	52.044.567
1. DBH Pajak	21.704.461
a. Pajak Penghasilan	16.992.716
b. Pajak Bumi dan Bangunan	4.711.745
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	30.340.106
a. Migas	27.496.894
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.619.919
c. Kehutanan	122.134
d. Perikanan	1.091.455
e. Panas Bumi	9.704
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	825.211.109
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	731.322.470
2. DAU ditentukan penggunaannya	93.888.639
a. Penggajian Formasi PPPK	7.155.264
b. Pendanaan Kelurahan	1.000.000
c. Bidang Pendidikan	21.775.820
d. Bidang Kesehatan	16.993.120
e. Bidang Pekerjaan Umum	46.964.435
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	322.642.722
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	72.870.029
a. Pendidikan	1.247.483
b. Kesehatan	2.598.536
c. Konektivitas	48.339.298
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	14.734.712
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	950.000
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	5.000.000
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	249.772.693
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	59.141.300
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	158.058.491
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	24.181.535
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	7.891.367
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	500.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	164.996.136
E. Insentif Fiskal	14.701.780

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. PAMEKASAN

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.516.554.665
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	55.423.489
1. DBH Pajak	24.588.132
a. Pajak Penghasilan	19.982.713
b. Pajak Bumi dan Bangunan	4.605.419
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	30.835.357
a. Migas	28.055.070
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.578.910
c. Kehutanan	154.129
d. Perikanan	1.037.544
e. Panas Bumi	9.704
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	893.745.807
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	737.151.539
2. DAU ditentukan penggunaannya	156.594.268
a. Penggajian Formasi PPPK	7.712.817
b. Pendanaan Kelurahan	2.200.000
c. Bidang Pendidikan	57.894.184
d. Bidang Kesehatan	60.377.737
e. Bidang Pekerjaan Umum	28.409.530
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	351.994.826
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	43.158.940
a. Pendidikan	5.795.786
b. Kesehatan	749.659
c. Konektivitas	26.911.624
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	9.701.871
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	308.835.886
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	107.172.300
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	164.477.253
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	692.000
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	28.403.990
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	8.090.343
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	191.972.621
E. Insentif Fiskal	23.417.922

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KAB. PASURUAN

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	2.304.450.712
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	109.140.758
1. DBH Pajak	78.854.637
a. Pajak Penghasilan	71.655.306
b. Pajak Bumi dan Bangunan	7.199.331
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	30.286.121
a. Migas	27.496.894
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.597.352
c. Kehutanan	204.517
d. Perikanan	930.653
e. Panas Bumi	56.705
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.311.189.980
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.055.829.834
2. DAU ditentukan penggunaannya	255.360.146
a. Penggajian Formasi PPPK	85.816.703
b. Pendanaan Kelurahan	4.800.000
c. Bidang Pendidikan	87.049.545
d. Bidang Kesehatan	60.673.801
e. Bidang Pekerjaan Umum	17.020.097
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	531.536.173
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	18.839.330
a. Pendidikan	3.128.745
b. Kesehatan	9.454.925
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	6.255.660
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	512.696.843
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	200.668.210
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	267.748.479
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	29.359.113
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	14.520.381
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	352.583.801
E. Insentif Fiskal	-

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. PONOROGO

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.816.063.366
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	59.322.187
1. DBH Pajak	29.122.431
a. Pajak Penghasilan	21.237.033
b. Pajak Bumi dan Bangunan	7.885.398
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	30.199.756
a. Migas	27.496.894
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.579.751
c. Kehutanan	279.602
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	9.704
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.111.705.565
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.017.568.016
2. DAU ditentukan penggunaannya	94.137.549
a. Penggajian Formasi PPPK	16.052.881
b. Pendanaan Kelurahan	5.200.000
c. Bidang Pendidikan	30.061.146
d. Bidang Kesehatan	27.454.131
e. Bidang Pekerjaan Umum	15.369.391
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	368.269.858
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	33.933.596
a. Pendidikan	1.800.760
b. Kesehatan	30.933.668
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	1.199.168
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	334.336.262
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	91.858.970
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	197.950.884
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	33.601.343
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	10.925.065
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	261.694.868
E. Insentif Fiskal	15.070.888

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KAB. PROBOLINGGO

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.866.247.240
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	62.669.589
1. DBH Pajak	31.975.547
a. Pajak Penghasilan	25.456.798
b. Pajak Bumi dan Bangunan	6.518.749
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	30.694.042
a. Migas	27.496.894
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.580.261
c. Kehutanan	450.398
d. Perikanan	1.124.782
e. Panas Bumi	41.707
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.058.617.650
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	888.928.761
2. DAU ditentukan penggunaannya	169.688.889
a. Penggajian Formasi PPPK	998.949
b. Pendanaan Kelurahan	1.000.000
c. Bidang Pendidikan	68.297.703
d. Bidang Kesehatan	76.275.102
e. Bidang Pekerjaan Umum	23.117.135
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	410.021.493
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	49.897.524
a. Pendidikan	782.813
b. Kesehatan	9.615.898
c. Konektivitas	24.648.049
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	4.986.555
h. Pangan Pertanian	9.864.209
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	360.123.969
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	124.939.920
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	186.773.657
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	30.914.387
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	12.119.605
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.376.400
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	327.771.213
E. Insentif Fiskal	7.167.295

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. SAMPANG

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.533.736.458
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	52.231.912
1. DBH Pajak	21.485.674
a. Pajak Penghasilan	16.547.172
b. Pajak Bumi dan Bangunan	4.938.502
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	30.746.238
a. Migas	27.837.844
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.578.910
c. Kehutanan	79.392
d. Perikanan	1.240.388
e. Panas Bumi	9.704
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	862.725.238
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	686.217.588
2. DAU ditentukan penggunaannya	176.507.650
a. Penggajian Formasi PPPK	3.275.624
b. Pendanaan Kelurahan	1.200.000
c. Bidang Pendidikan	95.088.559
d. Bidang Kesehatan	59.268.959
e. Bidang Pekerjaan Umum	17.674.508
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	396.861.860
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	52.191.051
a. Pendidikan	2.231.265
b. Kesehatan	19.093.798
c. Konektivitas	30.196.852
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	669.136
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	344.670.809
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	138.038.540
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	166.231.713
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	29.613.957
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	9.635.939
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	750.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	214.069.079
E. Insentif Fiskal	7.848.369

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. SIDOARJO

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	2.482.719.080
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	180.798.998
1. DBH Pajak	147.723.113
a. Pajak Penghasilan	136.448.389
b. Pajak Bumi dan Bangunan	11.274.724
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	33.075.885
a. Migas	30.441.498
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.578.910
c. Kehutanan	87.520
d. Perikanan	953.278
e. Panas Bumi	14.679
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.326.555.659
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.202.653.783
2. DAU ditentukan penggunaannya	123.901.876
a. Penggajian Formasi PPPK	27.064.553
b. Pendanaan Kelurahan	5.600.000
c. Bidang Pendidikan	51.146.364
d. Bidang Kesehatan	30.987.187
e. Bidang Pekerjaan Umum	9.103.772
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	620.157.570
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	28.549.836
a. Pendidikan	228.000
b. Kesehatan	11.005.086
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	14.179.569
e. Sanitasi	3.137.181
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	591.607.734
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	287.085.720
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	252.888.432
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	34.515.122
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	15.932.200
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	785.600
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	340.770.181
E. Insentif Fiskal	14.436.672

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KAB. SITUBONDO

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.323.743.630
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	69.648.264
1. DBH Pajak	25.895.391
a. Pajak Penghasilan	18.690.491
b. Pajak Bumi dan Bangunan	7.204.900
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	43.752.873
a. Migas	28.069.746
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	13.666.277
c. Kehutanan	475.867
d. Perikanan	1.484.842
e. Panas Bumi	56.141
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	821.205.100
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	672.130.000
2. DAU ditentukan penggunaannya	149.075.100
a. Penggajian Formasi PPPK	10.570.276
b. Pendanaan Kelurahan	800.000
c. Bidang Pendidikan	52.419.123
d. Bidang Kesehatan	53.173.353
e. Bidang Pekerjaan Umum	32.112.348
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	272.686.648
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	12.953.699
a. Pendidikan	1.977.597
b. Kesehatan	628.674
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	8.470.627
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	1.876.801
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	259.732.949
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	80.994.095
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	145.092.402
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	24.153.480
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	8.288.241
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	804.071
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	144.895.257
E. Insentif Fiskal	15.308.361

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. SUMENEP



(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	2.161.823.958
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	64.612.377
1. DBH Pajak	28.680.087
a. Pajak Penghasilan	18.669.603
b. Pajak Bumi dan Bangunan	10.010.484
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	35.932.290
a. Migas	28.737.704
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.578.910
c. Kehutanan	230.798
d. Perikanan	5.375.174
e. Panas Bumi	9.704
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.197.280.056
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	974.043.570
2. DAU ditentukan penggunaannya	223.236.486
a. Penggajian Formasi PPPK	8.688.535
b. Pendanaan Kelurahan	800.000
c. Bidang Pendidikan	94.226.003
d. Bidang Kesehatan	92.020.478
e. Bidang Pekerjaan Umum	27.501.470
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	544.833.789
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	193.249.534
a. Pendidikan	4.050.920
b. Kesehatan	4.720.745
c. Konektivitas	151.855.979
d. Air Minum	6.500.000
e. Sanitasi	12.484.283
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	4.231.739
h. Pangan Pertanian	9.405.868
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	351.584.255
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	108.150.051
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	189.858.083
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	699.010
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	34.300.223
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	12.209.208
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	653.820
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.313.200
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Hibah ke Daerah	12.501.000
1. Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan	12.501.000
2. Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan	-
E. Dana Desa	335.590.446
F. Insentif Fiskal	7.006.290

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. TRENGGALEK

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.473.529.114
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	54.727.977
1. DBH Pajak	23.813.370
a. Pajak Penghasilan	17.596.256
b. Pajak Bumi dan Bangunan	6.217.114
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	30.914.607
a. Migas	27.496.894
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.933.450
c. Kehutanan	356.640
d. Perikanan	1.117.919
e. Panas Bumi	9.704
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	929.975.022
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	807.184.182
2. DAU ditentukan penggunaannya	122.790.840
a. Penggajian Formasi PPPK	43.396.210
b. Pendanaan Kelurahan	1.000.000
c. Bidang Pendidikan	26.787.071
d. Bidang Kesehatan	21.898.477
e. Bidang Pekerjaan Umum	29.709.082
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	293.714.519
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	37.181.851
a. Pendidikan	652.296
b. Kesehatan	4.042.131
c. Konektivitas	20.199.250
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	7.576.516
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	4.711.658
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	256.532.668
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	77.939.340
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	148.596.967
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	20.722.570
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	8.123.131
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	750.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	163.308.540
E. Insentif Fiskal	31.803.056

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. TUBAN

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	2.389.563.137
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	512.314.002
1. DBH Pajak	72.764.272
a. Pajak Penghasilan	30.023.235
b. Pajak Bumi dan Bangunan	42.741.037
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	439.549.730
a. Migas	436.236.626
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.619.634
c. Kehutanan	603.618
d. Perikanan	1.080.148
e. Panas Bumi	9.704
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.093.092.737
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	973.210.527
2. DAU ditentukan penggunaannya	119.882.210
a. Penggajian Formasi PPPK	18.004.316
b. Pendanaan Kelurahan	3.400.000
c. Bidang Pendidikan	34.595.240
d. Bidang Kesehatan	54.246.229
e. Bidang Pekerjaan Umum	9.636.425
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	477.104.293
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	69.474.977
a. Pendidikan	4.544.854
b. Kesehatan	7.852.293
c. Konektivitas	41.310.263
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	8.850.190
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	3.809.100
h. Pangan Pertanian	3.108.277
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	407.629.316
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	129.472.320
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	223.255.927
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	799.465
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	32.955.218
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	12.852.505
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	500.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	1.187.566
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	6.606.315
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	307.052.105
E. Insentif Fiskal	-

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KAB. TULUNGAGUNG

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.951.081.735
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	62.364.612
1. DBH Pajak	31.931.396
a. Pajak Penghasilan	25.039.347
b. Pajak Bumi dan Bangunan	6.892.049
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	30.433.216
a. Migas	27.496.894
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.578.910
c. Kehutanan	335.698
d. Perikanan	1.012.010
e. Panas Bumi	9.704
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.187.416.064
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.086.646.220
2. DAU ditentukan penggunaannya	100.769.844
a. Penggajian Formasi PPPK	12.103.547
b. Pendanaan Kelurahan	2.800.000
c. Bidang Pendidikan	35.617.726
d. Bidang Kesehatan	25.992.558
e. Bidang Pekerjaan Umum	24.256.013
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	439.439.009
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	46.047.768
a. Pendidikan	4.455.368
b. Kesehatan	5.227.531
c. Konektivitas	18.721.974
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	8.305.274
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	5.153.182
h. Pangan Pertanian	4.184.439
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	393.391.241
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	121.766.370
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	221.450.855
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	614.485
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	30.458.586
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	12.359.340
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	1.000.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.340.945
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	255.226.307
E. Insentif Fiskal	6.635.743

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KOTA BLITAR

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	576.384.468
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	53.702.747
1. DBH Pajak	23.696.096
a. Pajak Penghasilan	19.453.858
b. Pajak Bumi dan Bangunan	4.242.238
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	30.006.651
a. Migas	27.496.894
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.578.910
c. Kehutanan	87.338
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	9.704
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	456.999.804
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	421.413.834
2. DAU ditentukan penggunaannya	35.585.970
a. Penggajian Formasi PPPK	4.669.507
b. Pendanaan Kelurahan	4.200.000
c. Bidang Pendidikan	17.617.904
d. Bidang Kesehatan	9.098.559
e. Bidang Pekerjaan Umum	-
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	65.681.917
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	658.260
a. Pendidikan	532.471
b. Kesehatan	125.789
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	65.023.657
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	25.100.350
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	33.064.704
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	4.838.223
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	2.020.380
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	-
E. Insentif Fiskal	-

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KOTA KEDIRI

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	853.502.639
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	84.567.171
1. DBH Pajak	54.569.637
a. Pajak Penghasilan	50.108.846
b. Pajak Bumi dan Bangunan	4.460.791
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	29.997.534
a. Migas	27.496.894
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.578.910
c. Kehutanan	78.221
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	9.704
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	637.504.735
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	576.851.906
2. DAU ditentukan penggunaannya	60.652.829
a. Penggajian Formasi PPPK	4.623.044
b. Pendanaan Kelurahan	9.200.000
c. Bidang Pendidikan	25.974.865
d. Bidang Kesehatan	13.651.883
e. Bidang Pekerjaan Umum	7.203.037
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	123.322.254
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	9.786.395
a. Pendidikan	499.957
b. Kesehatan	-
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	667.625
e. Sanitasi	4.612.776
f. Perumahan dan Permukiman	4.006.037
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	113.535.859
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	48.196.950
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	52.277.000
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	655.188
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	9.486.462
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	2.920.259
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	-
E. Insentif Fiskal	8.108.479

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KOTA MADIUN

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	715.679.383
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	64.104.234
1. DBH Pajak	34.095.384
a. Pajak Penghasilan	29.854.799
b. Pajak Bumi dan Bangunan	4.240.585
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	30.008.850
a. Migas	27.496.894
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.578.910
c. Kehutanan	89.537
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	9.704
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	530.628.223
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	490.928.793
2. DAU ditentukan penggunaannya	39.699.430
a. Penggajian Formasi PPPK	6.411.860
b. Pendanaan Kelurahan	5.400.000
c. Bidang Pendidikan	17.466.570
d. Bidang Kesehatan	10.421.000
e. Bidang Pekerjaan Umum	-
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	91.636.005
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	4.567.123
a. Pendidikan	527.974
b. Kesehatan	-
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	517.552
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	3.521.597
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	87.068.882
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	29.507.310
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	45.647.197
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	9.301.583
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	2.212.132
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	-
E. Insentif Fiskal	29.310.921

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KOTA MALANG

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.297.116.370
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	106.959.832
1. DBH Pajak	76.950.614
a. Pajak Penghasilan	72.254.944
b. Pajak Bumi dan Bangunan	4.695.670
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	30.009.218
a. Migas	27.496.894
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.578.910
c. Kehutanan	89.211
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	10.398
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	882.591.002
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	737.312.875
2. DAU ditentukan penggunaannya	145.278.127
a. Penggajian Formasi PPPK	69.675.543
b. Pendanaan Kelurahan	11.400.000
c. Bidang Pendidikan	32.865.490
d. Bidang Kesehatan	19.162.352
e. Bidang Pekerjaan Umum	12.174.742
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	300.465.825
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	34.066.061
a. Pendidikan	2.241.607
b. Kesehatan	-
c. Konektivitas	25.321.852
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	6.502.602
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	266.399.764
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	120.556.000
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	121.026.281
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	700.000
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	18.357.683
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	5.759.800
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	-
E. Insentif Fiskal	7.099.711

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KOTA MOJOKERTO

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	553.406.228
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	56.073.791
1. DBH Pajak	26.079.269
a. Pajak Penghasilan	21.590.261
b. Pajak Bumi dan Bangunan	4.489.008
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	29.994.522
a. Migas	27.496.894
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.578.910
c. Kehutanan	72.703
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	12.210
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	427.129.664
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	392.063.585
2. DAU ditentukan penggunaannya	35.066.079
a. Penggajian Formasi PPPK	3.740.252
b. Pendanaan Kelurahan	3.600.000
c. Bidang Pendidikan	18.629.064
d. Bidang Kesehatan	9.096.763
e. Bidang Pekerjaan Umum	-
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	70.202.773
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	1.823.662
a. Pendidikan	200.000
b. Kesehatan	-
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	1.623.662
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	68.379.111
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	23.214.690
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	31.606.853
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	5.968.310
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	1.916.313
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	1.641.655
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	3.525.600
D. Dana Desa	-
E. Insentif Fiskal	-

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KOTA PASURUAN

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	610.870.911
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	54.647.177
1. DBH Pajak	24.623.872
a. Pajak Penghasilan	20.354.367
b. Pajak Bumi dan Bangunan	4.269.505
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	30.023.305
a. Migas	27.496.894
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.581.015
c. Kehutanan	76.180
d. Perikanan	857.044
e. Panas Bumi	12.172
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	465.498.079
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	412.722.811
2. DAU ditentukan penggunaannya	52.775.268
a. Penggajian Formasi PPPK	2.508.989
b. Pendanaan Kelurahan	6.800.000
c. Bidang Pendidikan	20.136.519
d. Bidang Kesehatan	20.927.278
e. Bidang Pekerjaan Umum	2.402.482
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	90.725.655
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	6.296.137
a. Pendidikan	-
b. Kesehatan	1.652.874
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	845.224
e. Sanitasi	3.798.039
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	84.429.518
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	31.755.720
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	41.606.977
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	8.580.541
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	2.486.280
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	-
E. Insentif Fiskal	-

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KOTA PROBOLINGGO

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	657.481.994
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	54.812.984
1. DBH Pajak	24.795.517
a. Pajak Penghasilan	20.516.029
b. Pajak Bumi dan Bangunan	4.279.488
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	30.017.467
a. Migas	27.496.894
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.578.910
c. Kehutanan	83.234
d. Perikanan	848.725
e. Panas Bumi	9.704
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	493.967.926
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	439.042.741
2. DAU ditentukan penggunaannya	54.925.185
a. Penggajian Formasi PPPK	2.810.996
b. Pendanaan Kelurahan	5.800.000
c. Bidang Pendidikan	18.494.846
d. Bidang Kesehatan	21.937.778
e. Bidang Pekerjaan Umum	5.881.565
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	94.111.371
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.851.647
a. Pendidikan	311.892
b. Kesehatan	518.798
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	5.020.957
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	88.259.724
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	31.911.400
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	45.286.543
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	670.200
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	6.189.352
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	3.102.539
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	594.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	-
E. Insentif Fiskal	14.589.713

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KOTA SURABAYA

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	2.849.466.616
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	589.164.624
1. DBH Pajak	556.129.003
a. Pajak Penghasilan	550.246.402
b. Pajak Bumi dan Bangunan	5.882.601
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	33.035.621
a. Migas	30.441.498
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.578.910
c. Kehutanan	87.123
d. Perikanan	918.386
e. Panas Bumi	9.704
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.464.317.602
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.290.899.899
2. DAU ditentukan penggunaannya	173.417.703
a. Penggajian Formasi PPPK	48.994.972
b. Pendanaan Kelurahan	30.600.000
c. Bidang Pendidikan	58.283.528
d. Bidang Kesehatan	35.539.203
e. Bidang Pekerjaan Umum	-
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	766.802.209
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	13.300.000
a. Pendidikan	-
b. Kesehatan	13.300.000
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	753.502.209
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	394.858.580
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	276.428.650
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	1.423.456
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	58.059.146
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	21.132.305
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	1.199.412
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	-
E. Insentif Fiskal	29.182.181

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KOTA BATU

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	674.945.473
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	53.018.054
1. DBH Pajak	22.301.558
a. Pajak Penghasilan	17.350.670
b. Pajak Bumi dan Bangunan	4.950.888
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	30.716.496
a. Migas	28.069.746
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.611.804
c. Kehutanan	130.041
d. Perikanan	851.176
e. Panas Bumi	53.729
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	511.190.380
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	469.214.950
2. DAU ditentukan penggunaannya	41.975.430
a. Penggajian Formasi PPPK	4.646.275
b. Pendanaan Kelurahan	1.000.000
c. Bidang Pendidikan	18.395.374
d. Bidang Kesehatan	11.454.562
e. Bidang Pekerjaan Umum	6.479.219
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	79.530.872
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	1.049.909
a. Pendidikan	1.049.909
b. Kesehatan	-
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	78.480.963
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	29.538.100
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	40.397.754
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	6.029.094
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	2.516.015
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	22.944.352
E. Insentif Fiskal	8.261.815

TIM PENYUSUN

BUKU ALOKASI DAN RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TA 2025

PEMBINA	:	Luky Alfirman	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
PENGARAH	:	1. Ludiro 2. Sandy Firdaus 3. Purwanto 4. Jaka Sucipta 5. Lydia Kurniawati Christyana 6. Adriyanto 7. Agung Widiadi	Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Direktur Dana Transfer Umum Direktur Dana Transfer Khusus Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer
KETUA	:	Iwan Richard Butarbutar	Ketua Tim Reguler Penyaluran Dana Transfer
ANGGOTA	:	Kindy Rinaldy Syahrir, Mauliate Harnalyes Silitonga, Yuni Ariani, Bondan Widyatmoko, Aan Prianto, Ricka Yunita Prasetya, Tatang, Endah Pusparini, Rini Anjar Sari, Rahmatullah Priyo Kusuma, Ryan Andhika Wahyu Putra, Honiar Arfianto	
KONTRIBUTOR DATA	:	1. Tim Reguler Dana Alokasi Umum 2. Tim Reguler Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 3. Tim Reguler Dana Bagi Hasil Non Sumber Daya Alam 4. Tim Reguler Kebijakan dan Evaluasi Dana Transfer Umum 5. Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pengembangan Manusia dan Kebudayaan 6. Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Perekonomian dan Kemaritiman 7. Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Nonfisik 8. Tim Reguler Hibah Daerah 9. Tim Reguler Kebijakan dan Evaluasi Dana Transfer Khusus 10. Tim Reguler Pengelolaan Dana Desa 11. Tim Reguler Dana Otonomi Khusus 12. Tim Reguler Insentif Fiskal dan Keistimewaan 13. Tim Reguler Kebijakan dan Evaluasi Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan	



TERIMA KASIH

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,
Kementerian Keuangan

Gedung Radius Prawiro, Jl. Dr. Wahidin Raya No.1
Jakarta-10710



2025

BUKU ALOKASI DAN RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025



**Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia**

Gedung Radius Prawiro, Jalan Dr. Wahidin No. 1
Jakarta – 10710

www.djpk.kemenkeu.go.id

